DOI: https://doi.org/10.15548/tabuah.v22i1.20

Availabel Online at: https://rjfahuinib.org/index.php/tabuah
Majalah Ilmiah Tabuah
Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora
| ISSN (Online) 2614-7793 |

POLA KOMUNIKASI MASYARAKAT MUSLIM MELAYU DAN TIONGHOA: Studi Terhadap Penyelesaian Konflik di Kota Tanjung Balai

Agus Susanto
Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang
Email: agus_medan98@yahoo.com

Abstract

This article is the result of research that discusses how sociology of communication plays a role in communication between Malay-Chinese culture so as to minimize misconceptions that are vulnerable to conflict in society. How are the factors causing conflict between Malay and Chinese People in Tanjung Balai City. This research is a qualitative research with sociological-anthropological and phenomenological approach. The results of this study revealed that, to prevent the recurrence of the case of Tanjung Balai, North Sumatra, the people of Indonesia are divided due to socio-economic segregation, shelter, religion, ethnicity, work, there must be hard efforts. the pattern of communication is done with a policy that gives special treatment and affirmative action against the weak especially the natives. In addition, a forum is formed as a forum for dialogue and communication between different groups of socioeconomic stratification, residence, ethnicity, ethnicity and so on. To end social tensions due to socio-economic disparities between ethnic Chinese and indigenous peoples. Factors supporting the Malay and Chinese peace in Tanjung Balai, namely Tanjung Balai community awareness to stop conflict, cooperation of various parties in realizing peace, and the role of security forces in maintaining post-conflict stability. Efforts to stop open conflict and acts of violence that support the success of the negotiations, was successfully carried out by the authorities

Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang bagaimana sosiologi komunikasi berperan dalam komunikasi antar kultur Melayu-Tionghoa sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman-kesalahpahaman yang rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Bagaimana faktor-faktor penyebab konflik antar Masyarakat Melayu dan Tionghoa di Kota Tanjung Balai. Peneltian ini merupakan peneltian kualitatif dengan pendekatan sosiologis-antropologis dan fenomenologis. Hasil penelitian ini terungkap bahwa, untuk mencegah terulangnya kasus Tanjung Balai, Sumatera Utara, maka masyarakat Indonesia yang terpecah akibat segregasi sosial ekonomi, tempat tinggal, agama, suku, etnik, pekerjaan, harus ada upaya keras. pola komunikasi yang dilakukan adalah dengan suatu kebijakan yang memberi special treatment dan affirmative action terhadap mereka yang lemah terutama kaum pribumi. ***Disamping itu,*** *dibentuk wadah sebagai forum dialog dan komunikasi antar kelompok yang berbeda stratifikasi sosial ekonomi, tempat tinggal, etnik, suku dan sebagainya.* ***U****ntuk mengakhiri ketegangan sosial akibat kesenjangan sosial ekonomi antara etnik Tionghoa dengan kaum pribumi. Faktor pendukung perdamaian Melayu dan Tionghoa di Tanjung Balai, yaitu kesadaran masyarakat Tanjung Balai menghentikan konflik, kerjasama berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian, dan peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas pasca konflik. Upaya-upaya*

penghentian konflik terbuka dan tindakan-tindakan kekerasan yang mendukung berhasilnya perundingan, ternyata berhasil dilakukan oleh aparat.

Kata Kunci: Komunikasi, Masyarakat Muslim, Melayu dan Tionghoa

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seringkali diakibatkan oleh hubungan komunikasi sosial-keagamaan yang relatif eksklusif. Kerusuhan yang terjadi di Maumere (NTT) dan Timor Timur (1995), Surabaya, Situbondo, Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Jakarta, Solo, Kupang (1998), Ambon dan Sambas (1999) dan lain-lain merupakan bagian dari keberlanjutan konflik yang diakibatkan oleh pola hubungan komunikasi sosial-keagamaan yang tertutup.[1]

Konflik agama (*religion conflict)* merupakan sesuatu yang normal terjadi dalam masyarakat multi-agama (khususnya dalam masyarakat multi-kultural), di Indonesia misalnya. Salah satu faktor penyebab hal ini terjadi adalah *human error* dalam memahami teks-teks keagamaan, teks keagamaan ditafsirkan secara "serampangan" yang tidak mempertimbangkan aspek sejarah (*history),* psikologi, sosial (*social),* budaya (*culture),* situasi-kondisi kapan dan dimana ia berada[2].

Kerusuhan bernuansa Suku, Agama dan Ras (SARA) yang terjadi di Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara tanggal 29 Juli 2016 lalu merupakan bukti bahwa kekhawatiran berlanjutnya eskalasi konflik keagamaan akan terus terjadi adalah benar adanya sebagai akibat komunikasi yang kurang baik dalam hubungan sosial-keagamaan pada masyarakat khususnya pada lapisan bawah yang cenderung tertutup dan eksklusif.

Misalnya orang yang berasal dari suku batak, orang dari suku tersebut akan cenderung berbicara dengan keras. Ketika berbicara dengan orang suku jawa yang biasanya berbicara dengan halus, mungkin untuk orang jawa yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang suku batak akan mudah tersinggung dengan ucapan si suku batak yang selalu berbicara dengan logatnya yang keras. Contoh yang lainnya adalah seorang pria Indonesia akan merasa malu, benci, jijik, dan ingin marah ketika pipinya dicium oleh seorang pria Arab saat ia baru tiba di Jeddah untuk menunaikan ibadah haji. Bagi orang Arab, perilaku itu setulusnya menandakan persahabatan, namun bagi orang Indonesia mengisyaratkan perilaku homoseksual.[3]

Kesalahpahaman tersebut tentunya dapat diminimalisir jika setiap orang sedikitnya mengetahui bahasa, perilaku, serta budaya dari orang lain

[1] Sudarto, H. *Konflik Islam Kristen,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. xi.

[2] Burhanuddin Daya dan Amin Abdullah juga berpendapat bahwa dalam memahami agama diperlukan *multi approach* yaitu integrasi-interkoneksi, sehingga agama tidak terkesan "kaku" bahkan menyeramkan atau menakutkan. Kuliah umum Dialog Lintas Agama dan Budaya pada Prodi Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

[3] Dedi Mulyana dan Jalaludin Rakhmat *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. vii

baik masih dalam satu negara maupun berbeda negara. Untuk itu perlu mempelajari tentang bagaimana sosiologi komunikasi berperan dalam komunikasi antar kultur Melayu-Tionghoa sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman-kesalahpahaman yang rentan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Bagaimana Kronologis dan faktor-faktor penyebab konflik antar Masyarakat Melayu dan Tionghoa di Kota Tanjung Balai?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini diarahkan pada latar dan individu atau kelompok tersebut secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagi keutuhan, ia mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, ia memanfaatkan metode kualitatif dan analisis data secara induktif.

Ada dua pendekatan yang biasanya digunakan dalam menganalisis apakah suatu bentuk konflik bersifat konstruktif atau sebaliknya destruktif yang penulis gunakan dalam tulisan ini, yaitu pendekatan *fungsionalisme struktural* dan pendekatan *konflik.* Sumber tulisan ini adalah hasil wawancara Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Tanjung Balai, tokoh masyarakat, baik tokoh Melayu dan Tionghoa khususnya di Kota Tanjung Balai, dan masyarakat Kota Tanjung Balai dengan menggunakan informan kunci, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa lembaga organisasi sosial dan keagamaan yang relevan dengan tulisan ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan tulisan ini, penulis berusaha untuk menggali informasi dan menyelesaikan karya ini sebagai karya ilmiah yang orisinilitas, akuntabilitas dapat di pertanggungjawabkan. Dengan pendayagunaan kemampuan akademis yang dimiliki dan pengalaman praktis tentang permasalahan penelitian diharapkan hasil tulisan ini dapat memberi sumbangan bagi dunia melayu, khususnya bagi pengembangan Peradaban Islam Melayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Antar Kultural Melayu dan Tionghoa

a. Ruang Komunikasi Antar Kultural Melayu dan Tionghoa

Dalam komunitas antara kultur, secara umum tidak ada kendala dengan masyarakat setempat, baik dalam *image* ke-Cina-annya bagi masyarakat lokal maupun perlakuan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat kecuali dengan pihak pemerintah ketika berhadapan dengan birokrasi. Darmawan (Tan Giok Saw, umur 37)[4] misalnya mengatakan bahwa hubungannya dengan warga pribumi setempat cukup baik. Bahkan, ia mengakui, kami dengan tetangga yang pribumi sudah seperti saudara sendiri, seringkali tetangga kami sesama tetangga saling mengunjungi ketika ada salah satu keluarga kami yang sakit. Saw, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani, mengakui diantara mereka seakan sekat etnis itu sudah luntur dalam kegiatan kemasyarakatan.

Hal ini disaksikan sendiri oleh penulis ketika kami diantar oleh Tia (32)[5], seorang pengurus yayasan pendidikan Islam setempat yang asli pribumi, untuk menemui salah seorang warga Cina Kebon untuk wawancara. Tia saat itu memanggil salah seorang tetangganya warga keturunan Cina,

[4] Darmawan, wawancara penulis tanggal 22 Agustus 2017

[5] Tia menemani penulis untuk berbincang dan mewawancai informan, Agustus 2017

kami diperkenalkan dengan ramah dengan Liem Sin Ling (30). Kami melihat keakraban mereka saat itu yang seakan batas-batas etnis tidak menjadikannya sekat untuk saling akrab. Tia bertanya kepada Ling tentang siapa saja kira-kira yang bisa menjadi sumber informasi guna membantu penulisan tulisan ini.

Dengan ramah, Ling menghantar menuju tempat Sieven (23), warga keturunan Cina Kebon yang bekerja sebagai penjual *Hio* (alat-alat kebutuhan ibadah warga Tionghoa) dan air isi ulang. Setelah kami berbincang dengan Sieven, Ling mohon izin tidak bisa menemani lebih lama karena harus menjemput anaknya di sekolah, kami bertiga kemudian menuju Klenteng. Liem Eng Seng (56) menyambut dengan ramah, pengurus Klenteng Hoek Tek Bio di Teluk Nibung. Penulis melihat Tia dan Seng saling berbincang dan akhirnya Tia menitipkan penulis, dan Seng menyambut baik dan sempat menitip salam untuk orang tua Tia.

Dari cara Seng menyambut Tia, warga pribumi, penulis melihat adanya keakraban antara warga keturunan Cina dan Pribumi yang seolah sekat budaya antara keduanya hilang karena pembauran dalam kemasyarakatannya. Bukan keakraban yang seperti dijumpai di pasar antara penjual Cina dengan pembeli yang pribumi, namun keakraban layaknya sesama warga di pedesaan. Masalah keakraban dan kemasyarakatan ini penulis konfirmasikan kembali kepada Seng. Ia mengakui kenal baik dengan orang tua Tia meskipun mereka berbeda agama dan etnis. Ia juga menambahkan, bukan hanya kepada Tia dan keluarganya tetapi juga mengenal hampir seluruh warga di desa itu.

Sekat-sekat budaya baginya telah luntur oleh sistem kemasyarakatan yang ada. Kami seperti warga di pedesaan yang lain kok, jika ada perkumpulan warga atau ada undangan acara selamatan kami juga sering diundang dan saling membantu, ucapnya. Adalah suatu kenyataan warga pribumi memiliki asumsi bahwa keturunan Cina adalah kaum kapitalis yang mendominasi perekonomian, kikir, dan juga asosial. Sieven, lulusan SMU penjual *Hio*, membenarkan asumsi itu yang ia dengar dari teman-temannya, namun ia memberi pengecualian warga mayoritas Cina sudah membaur dengan masyarakat lokal dan sudah lama hidup sesuai dengan adat di masyarakat lokal. Hal ini, menurutnya, dikarenakan kondisi ekonomi warga Cina Kebon tidak jauh berbeda dengan warga pribumi bahkan ada yang di bawah rata-rata.

Specer seorang Filsuf Sosial Inggris yang pernah dekat dengan Marian Evans dalam Garna melihat bahwa "*Evolution is a change from a state of relatively indefinite, incoherent, homogeneity to a state of relatively definite, coherent, heterogeneity"*.[6] Keinginan manusia sebagai anggota masyarakat dapat berbeda berdasarkan pada masalah, pemaknaan komunikasi dalam hubungan sosial budaya masyarakat. Makna-makna tersebut dalam penafsirannya erat kaitannya dengan keinginan yang ada di masyarakat yang berbeda-beda. Akibat dari pendekatan pemenuhan keinginan dan pemaknaan yang berbeda-beda, kehidupan bersama dalam kehidupan sosial masyarakat sering terjadi penekanan. Yang kuat menekan yang lemah. Homan mengatakan makin dirugikan

[6] Judistira K. Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial*, (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1992), h. 35

seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, makin besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi.[7]

b. Keterlibatan Negara Komunikasi Antar Kultural Melayu dan Tionghoa

Forum Komunikasi Umat Beragama Propinsi Sumatera Selatan (FKUB Sumsel) bersilaturahim menyikapi kerusuhan umat beragama di Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara.[8] Ketua FKUB Sumsel Thohlon Abdul Rauf menjelaskan, alinea ke IV UUD 1945 jelas negara ini dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. "Ketuhanan yang ada dalam UUD, saya pahami agama adalah badannya negara oleh karena itu tidak ada tempat untuk sekuler di Indonesia," jelasnya.

Lanjut Thohlon, Beragama berarti beriman, karena ada iman maka ada keamanan, iman ada dalam agama oleh karena itu agamalah yang membuat menjadi aman. "Pertemuan ini mengantisipasi kebodohan yang terjadi dengan saling bakar. Kami mengimani bahwa perbedaan adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa," katanya. Sementara itu Majelis Buddhayana Indonesia Sumsel yang diketuai Indra Lily dalam pernyataannya mengatakan, menyikapi kejadian di Tanjung Balai Asahan agar pemerintah menjaga keamanan supaya tidak menjalar ke tempat lainnya. "Semua data Vihara saya sudah berikan kepada polisi dan cepat ditanggapi dengan menjaga Vihara yang ada di Palembang dan daerah lainnya di Sumsel," ucapnya.

Sementara itu dari Majelis Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Karto W menyuarakan sikapnya, kejadian di Tanjung Balai bagi umat Buddha khususnya merupakan hal yang menyedihkan sekali. "Disini (Sumsel red) saya meminta kepada polisi untuk waspada kejadian Tanjung Balai jangan sampai ke Sumsel. Saya dan umat Buddha Sumsel berterima kasih karena aparat dan pemerintah cepat tanggap atas kejadian di Tanjung Balai Asahan," katanya.

Majelis Tri Dharma, Chandra Husien juga mengungkapkan sikapnya, Klenteng merupakan tempat ibadah tiga ajaran yakni Buddha, Taoisme, dan Konghucu, memang dalam beribadah agak ramai oleh karena itu sewaktu kerusuhan di Tanjung Balai banyak yang menjadi sasaran. "Kejadian di Tanjung Balai adalah kesalahan kita sendiri yang tidak menjalankan aturan agama, sehingga umat kita melanggar. Sebaiknya kita saling memaafkan, merapatkan diri agar umat beragama di Palembang khususnya Sumsel umumnya bersatu," ajaknya. Pernyataan juga disampaikan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PW NU) Muhammad Adil, Sumsel luar biasa me*manage* konflik, banyak penelitian mengatakan Sumsel bebas konflik. "Sumsel menurut hemat saya, umatnya cerdas sehingga dengan cepat infonya ke umat sehingga terhindar dari kerusuhan. Harapannya kanwil mengawal umat masing-masing," paparnya. Muhammadiyah Purmansyah juga mengemukakan sikapnya, terjadinya kerusuhan karena tidak saling kenal-mengenal. Ketidak adanya organisasi menyebabkan umat bertindak sendiri-sendiri. "Nabi sendiri tidak membolehkan membakar rumah ibadah, anak-anak, perempuan dan orang tua walaupun dalam perang. Untuk menghindari kerusuhan

[7] Penjelasan ini dapat ditelusuri dalam George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 94

[8] Detak-Palembang.Com Palembang

makanya kita saling kenal-mengenal dan selanjutnya bekerja sama. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini berkelanjutan," harapnya.

BIN daerah Sumsel yang diwakili oleh Ega Mandala mengatakan, mengapresiasi pertemuan ini sebagai antisipasi kejadian, ini ke depannya tidak ada lagi kejadian kerusuhan dan menjadi lebih baik. "Pertemuan ini membangun kesepahaman, untuk Sumsel masih dalam keadaan kondusif dan aman," tutupnya. Menyusul kerusuhan berbau SARA yang terjadi di Tanjungbalai, Sumut, berbagai eleman masyarakat berkumpul dan menyepakati 6 poin rekonsiliasi. Apa isinya? Berbagai elemen yang terlibat dalam rekonsiliasi malam itu yakni MUI Tanjung Balai, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Komunikasi Umat Buddha (FKUB), Forum Komunikasi antar Lembaga Adat (Forkala), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), perwakilan etnis Tionghoa, Minang, tokoh agama, serta Forum Pembauran Kebangsaan Tanjung Balai. "Proses rekonsiliasi berjalan baik. Saat ini situasi sudah pulih dan terkendali," kata DPP Gerakan Muda Buddha Indonesia (Gema Buddhi).[9]

Pihaknya mengecam aksi kerusuhan di Tanjung Balai yang menyebabkan kerusakan sejumlah rumah agama. Gema Buddhi bersama para tokoh agama, pemuda dan Pemkot Tanjung Balai telah melakukan rekonsiliasi untuk memulihkan situasi pasca kerusuhan. Ketua Umum DPP Gemabudhi, Bambang Patijaya mengatakan, pihaknya telah menugaskan Gemabudhi Sumatera Utara untuk mengawal Sesdirjen Bimas Buddha Kemenag, Caliadi, turun ke lokasi. Mereka menempuh perjalanan 6 jam dari Medan ke Tanjung Balai untuk melakukan rekonsiliasi dengan seluruh pihak terkait.

Hasil rekonsiliasi tersebut menghasilkan beberapa poin yang berisi agar semua pihak menjaga kerukunan antar umat beragama di Tanjung Balai. Diharapkan setelah rekonsiliasi ini tidak ada lagi pihak yang melakukan provokasi. Berikut isi pernyataan sikap yang dibubuhi kop surat Pemkot Tanjung Balai: Kami mewakili seluruh unsur masyarakat Kota Tanjung Balai menyatakan sebagai berikut:[10]

1) Berperan secara pro aktif dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan umat beragama di Kota Tanjung Balai.
2) Menjadi contoh/teladan bagi seluruh jajaran/anggota masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjung Balai.
3) Bersama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab di Kota Tanjung Balai.
4) Bersedia menjadi penyampai informasi dan mengajak jajaran/anggota masyarakat mengenai pentingnya kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjung Balai.
5) Mendukung proses penegakan hukum dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Tanjung Balai
6) Bersama menjaga kondusifitas dan menolak segala bentuk anarkisme di Kota Tanjung Balai.

Kerusuhan berbau SARA yang sempat terjadi di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara membuat takut sejumlah masyarakat yang tinggal di

[9] Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (31/7/2017)

[10] Poin Rekonsiliasi Jaga Kerukunan Umat Beragama di Tanjung Balai Nur Khafifah - detikNews

sana. Apalagi, banyak kerusakan yang timbul akibat kejadian ini[11]. Agar kasus serupa tidak terulang lagi, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Rina Sari Ginting kembali mengingatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kordinasi Perangkat Daerah (FKPD) untuk tetap menjaga komitmen bersama yang telah dibangun pascakerusuhan.

Menurut penulis setiap terjadi konflik yang bernuansa "SARA", pemerintah dan aparat tidak pernah berusaha mencari akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan memecahkannya. Semua berkonsentrasi menghentikan konflik dan mencari pelaku yang memicu terjadinya konflik dan menghukum pelakunya. Konsekuensinya, timbul persepsi di masyarakat bahwa aparat selalu melindungi kelompok minoritas yang dijadikan sasaran amuk massa.

Oleh karena itu, dalam menangani kasus konflik di Tanjung Balai, sebaiknya pemerintah dan aparat, setelah berhasil menghentikan berlanjutnya konflik tersebut, juga mencari akar permasalahan terjadinya konflik dan berusaha memecahkan akar permasalahan timbulnya konflik tersebut.

Dalam rangka itu, penulis mencoba mencari dan berusaha menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Tanjung Balai, di tingkat domestik dan lokal, ada masalah serius yang dirasakan masyarakat sebagai ketidak-adilan.

Pertama, kesenjangan sosial ekonomi. Sudah menjadi realitas bahwa ekonomi dikuasai etnik Tionghoa (Cina). Mereka makin lama semakin kaya karena aparat dan kepala daerah bekerja sama dengan mereka. Ini terjadi karena dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), mereka terlibat menjadi cukong kepada setiap calon yang bertarung dalam pilkada, sehingga siapapun yang menang dalam pilkada, mereka sudah investasi terlebih dahulu sebagai penyandang dana dan kepala daerah yang terpilih otomatis merasa berhutang budi kepada mereka. Dampaknya, kepala daerah bekerjasama dengan mereka. Kondisi semacam itu, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar dan masyarakat kemudian marah, benci dan anti terhadap mereka yang kebetulan dari etnik Cina (Tionghoa).

Kedua, tumbuh arogansi di kalangan mereka terhadap masyarakat pribumi. Ini penyakit orang kaya yang dilindungi oleh aparat. Mereka tidak lagi *sensitive* menyaring kata dan kalimat kalau berbicara, sehingga masyarakat memendam kebencian dan kemarahan terhadap mereka. Kasus Ibu Herlina, yang marah dan menegur muazzin (orang yang azan dalam rangka memanggil untuk shalat) dengan menggunakan pengeras suara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, segera direspon dengan melampiaskan kemarahan dan kebencian yang sudah lama dipendam dengan membakar Vihara dan Kelenteng yang menjadi tempat beribadah orang-orang Cina (Tionghoa).

Ketiga, persepsi masyarakat terhadap etnis Tionghoa menjadi sangat negatif karena setiap terjadi masalah, aparat selalu memihak kepada mereka. Kondisi semacam ini menyebabkan muncul teroris dan aparat menjadi target untuk melampiaskan kemarahan, kebencian dan dendam.

Keempat, kebijakan dan perlakuan yang mengistimewakan mereka yang kaya, yang kebetulan adalah etnik Cina (Tionghoa), telah memancing perasaan tidak adil yang sewaktu-waktu diledakkan jika ada masalah sekecil apapun.

Kelima, faktor global turut mempengaruhi masyarakat berperilaku temperamental, cepat marah dan emosi.

Untuk mencegah terulangnya kasus Tanjung Balai, Sumatera Utara,

[11] Tribun-Medan.Com, Medan Sabtu (6/8/2017) siang.

maka masyarakat Indonesia yang terpecah akibat segregasi sosial ekonomi, tempat tinggal, agama, suku, etnik, pekerjaan, harus ada upaya keras:

Pertama, mengatasi dan memecahkan akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kalau permasalahan kesenjangan sosial ekonomi, diatasi dengan suatu kebijakan yang memberi *special treatment* dan *affirmative action* terhadap mereka yang lemah terutama kaum pribumi. Seperti di Negara Malaysia sebagai contoh, melalui New Economic Policy (NEP) telah sukses memperkecil kesenjangan sosial ekonomi antara etnik Melayu dan Cina.

Kedua, diperlukan wadah sebagai forum dialog dan komunikasi antar kelompok yang berbeda stratifikasi sosial ekonomi, tempat tinggal, etnik, suku dan sebagainya, sehingga kalau timbul masalah, bisa didialogkan dan dicarikan solusinya.

Ketiga, untuk mengakhiri ketegangan sosial akibat kesenjangan sosial ekonomi antara etnik Tionghoa dengan kaum pribumi, pemerintah sangat penting memberi prioritas pada pendidikan bagi kaum miskin dengan memberi beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri. Program memajukan kaum pribumi secara konsisten dan berkesinambungan yang mayoritas masih lemah dalam bidang pendidikan dan ekonomi mutlak dilakukan sebagai solusi jangka panjang.

Keempat, fokus dan memberi skala prioritas untuk mencegah terulangnya konflik tidak hanya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tetapi juga di daerah lain di Indonesia dengan memecahkan akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya konflik.

2. Faktor Pendukung Perdamaian Melayu dan Tionghoa di Tanjung Balai

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa faktor pendukung perdamaian di Tanjung Balai, yaitu antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Adanya kesadaran masyarakat Tanjung Balai menghentikan konflik. Selama konflik Tanjung Balai berlangsung korban harta benda tidak terhitung. Hal ini menimbulkan pemikiran dan kesadaran masyarakat akan dampak buruk yang ditimbulkan selama konflik. Kejenuhan akan konflik ini ternyata timbul disegala aspek masyarakat, baik pada tingkatan elit masing-masing pihak yang bertikai, maupun masyarakat tingkat bawah yang terutama merasakan dampak konflik paling parah. Inilah yang merupakan faktor pendorong utama perdamaian di kota Tanjung Balai. Dengan timbulnya kesadaran masyarakat untuk mengakhiri konflik tersebut, maka integrasi sosial manuju pada cita-cita perdamaian menjadi semakin mudah dicapai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan WAPRES HM Jusuf Kalla pada tanggal 10 Juni 2016. JK menyatakan konflik Tanjung Balai yang berlangsung harus berhenti. Ia mengatakan tidak ada pilihan, perselisihan mesti usai dan Tanjung Balai harus damai. Jika tidak damai, masyarakat Tanjung Balai, khususnya Tanjung Balai, akan menjadi paria, miskin dan terbelakang dari aspek apapun.

Kedua, Kerjasama berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian di Tanjung Balai ternyata tidak hanya diwujudkan oleh pemerintah dan kalangan elit agama saja, namun kerjasama dan kesolidan berbagai pihak baik dari kalangan organisasi kemasyarakatan lokal maupun luar Tanjung Balai, kaum akademisi dan agen-agen perdamaian individu yang mengerahkan segala cara dan pendekatannya masing-masing. Kalangan LSM menggunakan cara-cara kultural untuk mempersatukan kembali masyarakat beda agama

yang telah terlanjur tersegregasi dalam dua kelompok yang berbeda. Lembaga Antar Iman di Tanjung Balai juga senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan baik lokakarya dan memberikan pendidikan perdamaian terhadap masyarakat. Sedangkan lembaga-lembaga akademis seperti halnya pusat studi keamanan dan resolusi konflik dan beberapa peneliti juga memberikan sumbangsih dan penerangan kepada masyarakat luas tentang situasi di Tanjung Balai, kalangan akademisi juga memfasilitasi pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dan mengupayakan rekonsiliasi lanjutan. Di samping itu individu baik dan para perantau dari Tanjung Balai yang senantiasa memberikan bantuan moriil maupun materiil turut juga membantu jalannya perdamaian di Tanjung Balai.

Ketiga, Peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas pasca konflik. Meskipun pasca konflik pada penciptaan rasa aman dan terjaminnya stabilitas di Tanjung Balai. Upaya-upaya penghentian konflik terbuka dan tindakan-tindakan kekerasan yang mendukung berhasilnya perundingan, ternyata berhasil dilakukan oleh aparat.

Sedangkan penghambat keberhasilan kerjasama perdamaian di Tanjung Balai adalah: *Pertama,* Heterogenitas dan Segregasi Sosial Pasca Konflik. Konflik terbuka berskala massal dengan penggunaan kekerasan bukanlah peristiwa yang bisa serta merta terjadi. Mesti ada tahapan atau fase-fase yang dilalui. Konflik seperti itu hanya bisa terjadi kalau ada prakondisi yang memungkinkan dan mencukupi bagi terjadinya konflik terbuka. Prakondisi demikian umumnya merupakan hasil dari sebuah proses ketidakpuasan yang terakumulasi akibat perubahan-perubahan dalam jangka waktu yang lama. Perang antar etnis dan pemeluk agama yang disinyalir juga diboncengi oleh kelompok kepentingan, adalah luapan frustasi akibat benturan berbagai nilai budaya, represi. Golongan-golongan pendatang ini berhasil memegang kesempatan ekonomi, pendidikan, sosial bahkan kedudukan politik dan menyingkirkan kesempatan panduduk asli. Hal ini menimbulkan persoalan ketimpangan ekonomi dan semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi kota Tanjung Balai pasca konflik. Hal ini mempersulit upaya rekonsiliasi melalui jalan-jalan kultural. Sementara pendatang ini rata-rata telah bermukin lama di Tanjung Balai, sehingga sumber kehidupan mereka bergantung pula dari kegiatan ekonomi dan sosial di Tanjung Balai.

Kedua, Primordialisme dan Politisasi Agama. Konflik yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa, namun juga trauma psikologis, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya pada masa konflik. Rehabilitasi mental masyarakat ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Sementara perhatian pemerintah masih terpusat pada rehabilitasi fisik. Kondisi ini menjadikan *stereotipe,* trauma, dan kecurigaan dikalangan masyarakat. Ditambah pula dengan kepercayaan masyarakat terhadap proses perdamaian dan rekonsiliasi yang masih minim, sehingga kerentanan terhadap tindakan kekerasan baru masih selalu mengancam.

Ketiga, Kegagalan Pemerintah dalam Upaya Rekonstruksi Sosial-Ekonomi. Pasca konflik Tanjung Balai. Pemerintah telah memprakarsai perdamaian antara kedua komunitas melalui perjanjian yang

dilaksanakan di dalam daerah Tanjung Balai ataupun dilaksanakan di luar daerah Tanjung Balai. Peran Pemerintah Daerah untuk Mendorong terjadinya Komunikasi antar umat Beragama di Kota Tanjung Balai. Legalitas dan pemberdayaan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Di dalam perlindungan terhadap kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama bagaimana meningkatkan SDM dan Lembaga Kerukunan sesuai dengan keinginan umat, bangsa dan negara kita.

Kerukunan umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional. Jadi pemerintah dan tokoh Agama mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya kerukunan antar umat beragama merupakan syarat mutlak demi terwujudnya suasana aman, damai, tentram dan sentosa.

Beberapa peran Pemerintah Kota Tanjung Balai dalam mewujudkan komunikasi antar umat beragama di Kota Tanjung Balai dapatlah dilihat dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Tanjung Balai untuk mewujudkan komunikasi antara umar beragama, Pemerintah Kota Tanjung Balai telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjung Balai. Forum didirikan oleh masyarakat yang mewakili keberadaan agama dan disahkan oleh pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama ini didirikan di tingkat Kota sampai ke tingkat Kecamatan, sebagai sebuah media untuk berkomunikasi antar umat beragama. Kehadiran Fokum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjung Balai adalah upaya untuk memfasilitasi komunikasi yang mengarah pada keharmonisasian dan dinamisasi pembangunan hubungan internal umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pihak lainnya.

Disinilah sesungguhnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat diperlukan guna merespon berbagai persoalan tersebut, setidaknya diawali dengan dialog, negosiasi, dan membangun komitmen bersama sebagai langkah konkrit dari amanat Peraturan Bersama Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Program Pembinaan Kehidupan Umat Beragama seperti diketahui, persoalan agama merupakan hal yang sensitif, karena menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Agama menyangkut kesadaran religius, yang tersembunyi dalam setiap individu. Jadi keimanan beragama merupakan suatu hal yang tidak dapat dipaksakan. Setiap usaha memaksa, dengan cara mewajibkan atau melarang agama tertentu merupakan pelanggaran serius terhadap hak pribadi). Oleh karena itu penghinaan atau penghujatan terhadap suatu agama tertentu menjadi persoalan serius yang sulit

untuk diatasi, apalagi hanya memandang dari perspektif hukum positif.

Jadi pada dasarnya umat beragama yang berbeda-beda di Indonesia mempunyai dasar untuk mampu hidup rukun dan berdampingan bersama. Namun demikian searah dengan perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan perubahan pula dalam hubungan kehidupan keagamaan, antara lain ada banyak kasus kerusuhan besar yang disulut oleh faktor perbedaan agama. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan yang mendorong terjadinya perubahan sosial yang mendasar dan bermacam-macam. Perubahan tersebut searah dengan semakin majunya masyarakat menuju era modernisasi dan globalisasi dalam segenap bidang kehidupan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat agama yang komunikatif, Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui bagian Kesra Setda Kota Tanjung Balai sejak tahun 2008 melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan melalui program dialog lintas agama. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa persaudaraan, menghargai perbedaan antar umat beragama. Syarat untuk mencapai dialog antar umat beragama adalah dipenuhinya prasyarat dialog, seperti pelaku dialog yang mencapai kesadaran moral otonom, memegang prinsip etika universal, memerhatikan setiap pola tindakan yang dilakukan, menciptakan kondisi dan situasi pembicaraan ideal dengan mengatasi segala macam hambatan, dan kemungkinan distorsi yang terjadi dalam komunikasi.

Kegagalan dalam berkomunikasi juga menjadi salah satu penyebab konflik. Yaitu pada kegagalam komunikasi Sekunder (*Secondary Breakdown Communication*), dimana pandangan persepsi yang diungkapkan perempuan etnis Tionghoa kepada warga beragama Islam saat itu justru menimbulkan konflik yang berujung tindakan anarkis.[12]

Meski begitu, beberapa asumsi mengatakan bahwa konflik ini terjadi disebabkan adanya kesenjangan ekonomi di Tanjung Balai. Sudah menjadi realitas bahwa ekonomi dikuasai etnik Tionghoa (Cina). Mereka makin lama semakin kaya karena aparat dan kepala daerah bekerja sama dengan mereka. Ini terjadi karena dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka terlibat menjadi cukong kepada setiap calon yang bertarung dalam pilkada, sehingga siapapun yang menang dalam pilkada, mereka sudah investasi terlebih dahulu sebagai penyandang dana dan kepala daerah yang terpilih otomatis merasa berhutang budi kepada mereka. Dampaknya, kepala daerah bekerjasama dengan mereka. Kondisi semacam itu, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar dan masyarakat kemudian marah, benci dan anti terhadap mereka yang kebetulan dari etnik Cina (Tionghoa).

Kedua, tumbuh arogansi di kalangan mereka terhadap masyarakat pribumi. Ini penyakit orang kaya yang dilindungi oleh aparat. Mereka tidak lagi *sensitive* – menyaring kata dan kalimat kalau berbicara, sehingga masyarakat memendam kebencian dan kemarahan terhadap mereka. Kasus Melianda, yang marah dan menegur muazzin dengan menggunakan pengeras suara di Tanjung Balai,

[12] Alfan Hidayat, Makalah, "*Analisis Konflik & Pluralisme: Kasus SARA Tanjung Balai Komunikasi Antar Budaya"*, Maret 2017.

Sumatera Utara, segera direspon dengan melampiaskan kemarahan dan kebencian yang sudah lama dipendam dengan membakar Wihara dan Kelenteng yang menjadi tempat beribadah orang-orang Cina (Tionghoa).

Ketiga, persepsi masyarakat terhadap mereka menjadi sangat negatif karena setiap terjadi masalah, aparat selalu memihak kepada mereka. Kondisi semacam ini menyebabkan muncul teroris dan aparat menjadi target untuk melampiaskan kemarahan, kebencian dan dendam.

Keempat, kebijakan dan perlakuan yang mengistimewakan mereka yang kaya, yang kebetulan adalah etnik Cina (Tionghoa), telah memancing perasaan tidak adil yang sewaktu-waktu diledakkan jika ada masalah sekecil apapun. Dan yang *kelima* adalah faktor global yang turut mempengaruhi masyarakat berperilaku temperamental, cepat marah, dan emosi. Selain lima faktor yang dikemukakan di atas, penyebab mudah meledaknya suatu konflik adalah karena masyarakat membentuk klaster, kumpulan, dan kelompok berdasarkan agama, suku, etnik, pekerjaan, dan sebagainya.[13]

Dalam kenyataan terputusnya komunikasi antar umat karena pemahaman keagamaan yang tidak menyeluruh. Hal ini menyebabkan tafsir untuk memahami pengertian kafir di tengah masyarakat Tanjung Balai belum begitu dipahami.

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry[14] menyatakan bahwa masyarakat Tanjung Balai diminta Tahan diri. Beliau mengatakan "isu yang berkenaan dengan suku dan agama seperti ini memang sangat sensitif. Yang sudah terjadi jangan sampai meluas. Kami meminta dengan sangat agar warga Tanjung Balai bisa menahan diri dan tidak terpancing provokasi yang diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi" ujarnya.

Menurut Arifin Saleh Siregar[15] apa yang terjadi di Tanjung Balai menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa potensi konflik masih ada. Pergesekan yang terjadi apakah dikarenakan SARA. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan, hal ini bisa tersulut sedikit saja langsung berkobar.

Demikian juga dikatakan oleh Tokoh Pemuda Tionghoa serta anggota DPRD Sumut, Brilian Mokhtar[16] yang menyatakan bahwa kejadian di Tanjung Balai disebabkan karena faktor SARA. Menurut Beliau kejadian tersebut sebagai akibat dari imbas komunikasi yang tersendat dan di antara kedua pihak terjadi salah tafsir. Jalan keluarnya adalah dengan memfungsikannya kembali tugas satuan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan fungsi komunikasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat difahamai bahwa pesan dalam sebuah komunikasi sangat berpengaruh di dalam masyarakat, melalui pesan tersebut akan terbentuk satu ikatan yang kuat atau sebaliknya justru memperlebar jarak antar masyarakat. Jarak antara masayarakat tersebut dapat terbentuk dalam berbagai situasi dan kondisi, bila terjadi kesenjangan, maka disitulah muncul konflik yang dalam hal ini dapat menjadi konflik sosial. Karena konflik sosial dalam proses komunikasi sering

[13] Musni Umar. Artikel Kompasiana "Membedah Akar Masalah Konflik SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara". Di publish dilaman http://www.kompasiana.com pada tanggal 1 Agustus 2017.

[14] Pernyataan dalam Tribun News.Com sabtu 30 Juli 2017

[15] Pengamat Sosial UMSU, news analisis

[16] Tokoh Pemuda keturunan Tionghoa juga anggota DPRD Sumut

ditimbulkan oleh akibat pesan yang disampaikan dalam setiap aktivitas pertukaran pesan, baik dalam komunikasi interpesonal, antarpersonal, kelompok, media maupun dalam bentuk komunikasi massa. Penyebabnya adalah setiap pesan yang ditimbulkan berbeda pemaknaan antara komunikan dengan komunikator. Jika pesan tidak terlalu menegangkan masih dapat dipahami setiap individu, kelompok, dan massa mampu mengendalikan emosinya yang mengarah pada konflik. Akan tetapi apabila emosi setiap lingkungan penerima pesan ditekan secara terus menerus maka timbullah berbagai konflik sosial budaya yang berkepanjangan.

Konflik sosial yang digerakkan oleh "gerakan sosial klasik" (*old social movement*) yang sepenuhnya berorientasikan pada gugatan rasa-keadilan materil. Secara konkret, konflik sosial mewujud dalam bentuk tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal pokok demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, seperti: redistribusi lahan bagi petani non-tanah, tuntutan peningkatan upah-minimum bagi buruh industri, peningkatan derajat kesehatan, pendidikan dan pelayanan umum lainnya bagi masyarakat miskin, dan sebagainya. Konflik sosial yang dimunculkan oleh "gerakan sosial baru" (*new social movement*) yang berorientasikan sangat kuat pada pemenuhan kebutuhan akan pengakuan atas eksistensi ideologi baru atau arus-pemikiran baru dalam sistem tata-kehidupan sosio-politik nasional. Ideologi-ideologi seperti demokratisme, *ecologism*, *sustainability*, *good-governance*, feminisme adalah contoh-contoh dari arus pemikiran baru yang menghendaki pengakuan tersebut.[17]

Benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa serta menyentuh hampir di segala aspek (*frame of conflict*) kehidupan masyarakat (konflik agraria, Sumber Daya Alam, nafkah, ideologi, identitas-kelompok, batas teritorial, dan semacamnya). Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu stress sosial, kepedihan (*bitterness*), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Kehancuran *asset-asset non-material* yang paling kentara ditemukan dalam wujud "dekapitalisasi" modal sosial yang ditandai oleh hilangnya *trust* di antara para-pihak yang bertikai, rusaknya *networking*, dan hilangnya *compliance* pada tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama-sama).[18] Seolah semua yang telah dengan susah payah dibangun dan ditegakkan oleh masing-masing warga yang bertikai, dengan mudah diakhiri begitu saja karena konflik sosial.

Dilihat dari ruang konflik, maka secara teori terdapat tiga ruang konflik sosial pada aras antar-ruang kekuasaan, yang dikenal dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan, yaitu "*ruang kekuasaan negara*", "*masyarakat sipil atau kolektivitas-sosial*", dan "*sektor swasta*".[19]

---

[17] Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*, Makalah disusun dan disajikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema:"Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional", Pontianak 10-11 Januari 2007, h. 2

[18] Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial*…, h. 1

[19] *Ibid.*, h. 3

Pada ruang kekuasaan Negara, Warga masyarakat sipil atau kolektivitas sosial berhadap-hadapan melawan negara dan sebaliknya. Konflik sosial yang berlangsung antara warga masyarakat atau kolektivitas sosial melawan swasta dan sebaliknya. Konflik sosial yang berlangsung antara swasta berhadap-hadapan melawan Negara dan sebaliknya.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sederhana tentang pola komunikasi masyarakat Melayu serta Etnis Tionghoa menyangkut kerusuhan massa di Kota Tanjung Balai yaitu: ***Pertama***, mengatasi dan memecahkan akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kalau permasalahan kesenjangan sosial ekonomi, diatasi dengan suatu kebijakan yang memberi *special treatment* dan *affirmative action* terhadap mereka yang lemah terutama kaum pribumi. ***Kedua***, diperlukan wadah sebagai forum dialog dan komunikasi antar kelompok yang berbeda stratifikasi sosial ekonomi, tempat tinggal, etnik, suku dan sebagainya, sehingga kalau timbul masalah, bisa didialogkan dan dicarikan solusinya. ***Ketiga***, untuk mengakhiri ketegangan sosial akibat kesenjangan sosial ekonomi antara etnik Tionghoa dengan kaum pribumi, pemerintah sangat penting memberi prioritas pada pendidikan bagi kaum miskin dengan memberi beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan di dalam dan luar negeri. ***Keempat***, fokus dan memberi skala prioritas untuk mencegah terulangnya konflik tidak hanya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tetapi juga di daerah lain di Indonesia dengan memecahkan akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya konflik.

Faktor pendukung perdamaian Melayu dan Tionghoa di Tanjung Balai, yaitu: *Pertama,* Kesadaran Masyarakat Tanjung Balai Menghentikan Konflik. Selama konflik Tanjung Balai berlangsung korban harta benda tidak terhitung. Hal ini menimbulkan pemikiran dan kesadaran masyarakat akan dampak buruk yang ditimbulkan selama konflik. Kejenuhan akan konflik ini ternyata timbul disegala aspek masyarakat, baik pada tingkatan elit masing-masing pihak yang bertikai, maupun masyarakat tingkat bawah yang terutama merasakan dampak konflik paling parah. *Kedua,* Kerjasama berbagai pihak dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian di Tanjung Balai ternyata tidak hanya diwujudkan oleh pemerintah dan kalangan elit agama saja, namun kerjasama dan kesolidan berbagai pihak baik dari kalangan organisasi kemasyarakatan lokal maupun luar Tanjung Balai, kaum akademisi dan agen-agen perdamaian individu yang mengerahkan segala cara dan pendekatannya masing-masing. *Ketiga,* Peran aparat keamanan dalam menjaga stabilitas pasca konflik. Meskipun pasca konflik pada penciptaan rasa aman dan terjaminnya stabilitas di Tanjung Balai. Upaya-upaya penghentian konflik terbuka dan tindakan-tindakan kekerasan yang mendukung berhasilnya perundingan, ternyata berhasil dilakukan oleh aparat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Munawar, Said Agil Husin.*Fikih Hubungan Antar Agama.* Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Dharmawan, Arya Hadi, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat),* Makalah disusun dan disajikan

pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: ”Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional”, Pontianak 10-11 Januari 2007.

Daya, Burhanuddin dan Amin Abdullah, *Kuliah Umum Dialog Lintas Agama dan Budaya*. Pada Prodi Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

Garna, Judistira K., *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1992.

Hidayat, Alfan, Makalah “*Analisis Konflik & Pluralisme: Kasus SARA Tanjung Balai Komunikasi Antar Budaya”*, Maret: 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Poloma, Margaret. M. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Rakhmat, Jalaluddin, *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Sudarto, *Konflik Islam Kristen*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Sutardi, Tedi, *Antropologi; Mengungkap Keberagamn Budaya*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Umar, Musni, Artikel Kompasiana “Membedah Akar Masalah Konflik SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara”. Di publish dilaman http://www.kompasiana.com pada tanggal 1 Agustus 2017.

Zeitlin, Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Bambang detikcom, Minggu (31/7/2017)

Detak-Palembang.Com Palembang

Poin Rekonsiliasi Jaga Kerukunan Umat Beragama di Tanjung Balai Nur Khafifah - detikNews

Tribun-Medan.Com, Medan Sabtu (6/8/2017) siang. Tribun News.Com Sabtu 30 Juli 2017.